

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
PERBANDINGAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH
DENGAN REALISASI PENGELUARAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA PADA
TAHUN 2015-2018

Oleh :

Lenshy Aprisilia Anastasia

17101106047



PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO
2020

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PERBANDINGAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH
DENGAN REALISASI PENGELUARAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA PADA TAHUN
2015-2018

Lenshy Aprisilia Anastasia

17101106047

Praktek Kerja Lapangan

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Sarjana Komputer Pada Program Studi Sistem Informasi

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO
2020

Judul : Analisis Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Dengan Realisasi
Pengeluaran Daerah Pemerintah Kota Toraja Utara Pada Tahun 2015-2018

Nama : Lenshy Aprisilia Anastasia

NIM : 17101106047

Lokasi : Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara

Waktu : 2 Januari 2020 – 5 Februari 2020

Menyetujui,

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing Lapangan



Charles E. Mongi, S. Si, M. Si
NIP : 19840104 200812 1 005

Pembimbing Lapangan

Kepala Statistik Sosial BPS Kab. Torut



Kalvyn Matasik, SE
NIP : 19630531 199403 1001

Mengetahui

Dekan FMIPA UNSRAT



Prof. Dr. Benny Pinontoan,
M.Sc

NIP : 196606041995121001

Ketua Jurusan Matematika



Dr. Nelson Nainggolan, M.Si
NIP : 196703091996031001

Kepala Badan Pusat Statistik

Kabupaten Toraja Utara



Joni Matasik, SE
NIP : 19660107199103100

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya berkat dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dengan judul “Analisis Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Dengan Realisasi Pengeluaran Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Pada Tahun 2015-2018”. Pelaksanaan sampai dengan penyusunan laporan PKL ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Disampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Charles E. Mongi, S.Si, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan selama penyusunan laporan ini.
2. Bapak Joni Matasik, SE selaku Kepala Badan Pusat Statistik Toraja Utara
3. Bapak Kalvyn Matasik, SE selaku Kepala Sub Bagian Produksi Badan Pusat Statistik Toraja Utara.
4. Bapak Elias Patawaran, SE dan Bapak Dannar K.A. Prasetya, S.Tr.Stat dari bidang statistik produksi yang mengarahkan penulis selama pembuatan laporan PKL.
5. Semua Pejabat, Pegawai dan Staf Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara.
6. Orang tua, semua keluarga dan juga teman-teman yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi.
7. Semua pihak yang telah membantu selama kegiatan PKL sampai penyusunan laporan ini.

Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati serta membalas kebaikan yang lebih besar dari yang telah diberikan selama ini. Penulis menyadari akan keterbatasan sehingga diharapkan saran, masukan dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan laporan ini.

Toraja Utara, 08 Februari 2020

Lenshy Aprisilia Anastasia

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Lokasi dan Periode PKL.....	2
II TINJAUAN PUSTAKA.....	3
2.1 Sejarah BPS.....	3
2.2 Visi dan Misi BPS.....	7
2.3 Arti Logo BPS.....	7
2.4 Tugas,Fungsi & Kewenangan BPS.....	8
2.5 Nilai-Nilai Inti BPS.....	9
2.6 Sistem Statistik Nasional.....	11
2.7 Diseminasi & Pelayanan Informasi Statistik.....	12
2.7 Kegiatan Statistik BPS.....	13
2.7 BPS Kab.Toraja Utara.....	16
III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN.....	20
IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	21
4.1 Data Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah.....	21
4.2 Data Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah.....	23
4.3 Pembahasan.....	24
V PENUTUP.....	26
5.1 Kesimpulan.....	26
5.2 Saran.....	26
DAFTAR PUSTAKA.....	v
LAMPIRAN.....	vi

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Toraja Utara Dari Tahun 2015-2018.....	22
Tabel 2	Data Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Toraja Utara Dari Tahun 2015-2018.....	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Logo Badan Pusat Statistika	8
Gambar 2	Struktur Organisasi BPS Kab.Toraja	9
Gambar 3	Grafik Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah.....	22
Gambar 4	Grafik Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah	23
Gambar 5	Grafik Perbandingan Realisasi Pendapatan dengan Pengeluaran Pemerintah Daerah.....	23

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan suatu program belajar atau kegiatan di perguruan tinggi yang pada dasarnya harus diikuti oleh seluruh mahasiswa. Biasanya, kegiatan PKL ini diatur oleh pihak kampus sebagai salah satu bagian dari syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana nantinya. Program ini memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengabdikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh di kampus dengan terjun secara langsung kelapangan.

Dengan adanya PKL ini, mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman serta bisa melatih mahasiswa dalam menghadapi sekaligus mengatasi masalah yang mungkin muncul ketika berhadapan langsung di dunia kerja nantinya. Di samping itu, mahasiswa juga bisa memperoleh gambaran nyata didunia pekerjaan dengan program studi yang ditekuninya saat ini, dengan kata lain program ini bertujuan agar mahasiswa bisa melatih diri untuk beradaptasi dengan pekerjaan secara nyata.

Badan Pusat Statistik (BPS), adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pokok sebagai penyedia data statistik dasar, baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat umum, secara nasional maupun regional. Dalam tata strukturnya, BPS langsung dibawah presiden. BPS terbagi kedalam tiga tingkatan, BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota.

Dalam memenuhi fungsi pokok sebagai penyedia data statistik, BPS menyediakan publikasi berita statistik yang diterbitkan dalam bentuk *hardcopy* berupa buku dan *softcopy* berupa file dalam format pdf. Masing-masing tingkatan BPS memiliki publikasi tersendiri. BPS tingkat Kabupaten/ Kota hanya menyediakan publikasi mengenai kabupaten/ kota tersebut begitu pula pada

tingkatan BPS Provinsi dan BPS Pusat. BPS Pusat tidak memiliki publikasi BPS Provinsi dan BPS Provinsi tidak memiliki publikasi BPS Kabupaten/ Kota.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan realisasi pendapatan daerah dengan realisasi pengeluaran daerah di Kab. Toraja Utara dari tahun 2015-2018?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbandingan tersebut?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Salah satu prasyarat kelulusan di Fakultas MIPA UNSRAT.
2. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik antara Universitas Sam Ratulangi dengan berbagai instansi.
3. Mengetahui bagaimana perbandingan realisasi pendapatan daerah dengan realisasi pengeluaran daerah di Kab. Toraja Utara dari tahun 2015-2018.
4. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tersebut.

1.4. Lokasi dan Periode PKL

- Lokasi Pelaksanaan PKL : Kantor Badan Pusat Statistika Kabupaten Toraja Utara
- Waktu Pelaksanaan : 02 Januari 2020 – 05 Februari 2020
- Jam Kerja : 07.30 – 16.00
- Penempatan : Bidang Statistik Produksi

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sejarah Badan Pusat Statistik (BPS)

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. Badan Pusata Statistik sendiri memiliki sejarah yang cukup panjang. Badan Pusat Statistik memiliki 4 masa peralihan dari awal berdirinya hingga sekarang.

2.1.1 Masa Pemerintahan Hindia-Belanda

Didirikan pada bulan Februari 1920 oleh Direktur Pertanian, Kerajinan, dan Perdagangan (Directeur van Landbouw Nijveirhed en Handel) di Bogor yang bertugas mengolah dan mempublikasikan data statistik. Pada tanggal 24 September 1924, pusat kegiatan statistik dipindahkan dari Bogor ke Jakarta dengan nama Central Kantoor Voor de Statistiek (CKS) atau Kantor Pusat Statistik. Kegiatannya pada waktu itu diutamakan untuk mendukung kebijakan Pemerintah Hindia Belanda. Produk perundang-undangan Kantor Pusat Statistik adalah Volkstelling Ordonnantie 1930 (Staatsblad 1930 Nomor 128) yang mengatur sensus penduduk dan Statistiek Ordonnantie 1934 (Staatsblad Nomor 508) tentang kegiatan perstatistikan. Pada tahun 1930,

lembaga CKS melaksanakan suatu kegiatan monumental, yaitu Sensus Penduduk yang pertama dilakukan di Indonesia.

2.1.2. Masa Pemerintahan Jepang

Tahun 1942-1945, CKS beralih ke pemerintahan militer Jepang, dan kegiatannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perang (data militer). Nama CKS diubah menjadi Shomubu Chosasitsu Gunseikanbu dan bernaung di bawah Gubernur Militer (Gunseikanbu).

2.1.3. Masa Pemerintahan RI 1945 – 1965

Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Shomubu Chosasitsu Gunseikanbu diubah menjadi Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum (KAPPURI), dipimpin oleh Mr. Abdul Karim Pringgodigdo. Pada awal 1946, KAPPURI pindah mengikuti pindahnya pusat pemerintahan RI ke Yogyakarta. Saat itu KAPPURI dipimpin oleh Semaun. Di lain pihak di Jakarta CSK diaktifkan kembali oleh Pemerintah Federal (Belanda). Berdasarkan surat edaran Kementerian Kemakmuran Nomor 219/SC, tanggal 12 Juni 1950, Shomubu Chosasitsu Gunseikanbu dan KAPPURI dilebur menjadi Kantor Pusat Statistik (KPS) dan berada di bawah naungan Kementerian Kemakmuran. Pada tanggal 1 Maret 1952, Menteri Perekonomian mengeluarkan Keputusan Nomor P/44 yang menyatakan KPS berada di bawah dan bertanggung jawab pada Menteri Perekonomian. Berdasarkan Keputusan Menteri Perekonomian Nomor 18.099/M Tanggal 24 Desember 1953, kegiatan KPS dibagi menjadi 2 bagian yaitu Afdeling A merupakan Bagian Riset dan Afdeling B merupakan Bagian

Penyelenggaraan dan Tata Usaha. Pada tanggal 1 Juni 1957, dengan Surat Keputusan Presiden RI No.172/1957, KPS diubah menjadi Biro Pusat Statistik (BPS) dan bertanggung jawab langsung dibawah Perdana Menteri. Pada tanggal 24 September 1960, UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus diundangkan menggantikan Volkstelling Ordonnantie 1930 (Staatsblad 1930 Nomor 128). Pada tanggal 26 September 1960, UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik diundangkan menggantikan Statistiek Ordonnantie 1934 (Staatsblad Nomor 508). Berdasarkan Keputusan Perdana Menteri Nomor 26/P.M/1958 tanggal 16 Januari 1958, BPS diberi tugas melakukan pekerjaan persiapan Sensus Penduduk. Sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor 6 Tahun 1960, pada tahun 1961 BPS menyelenggarakan Sensus Penduduk pertama sejak masa kemerdekaan. Di tiap kantor Gubernur (Propinsi), Kab/Kota dan Kecamatan dibentuk bagian yang mengurus pelaksanaan Sensus Penduduk.

2.1.4. Masa Pemerintahan RI 1966 – Sekarang

Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.Aa/C/9 Tahun 1965 tanggal 19 Februari 1965 dinyatakan bahwa Bagian Sensus di Kantor Gubernur dan Kabupaten/Kota ditetapkan menjadi Kantor Cabang BPS dengan nama Kantor Statistik dan Sensus Daerah. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Pemerintah menetapkan tiga buah Peraturan Pemerintah tentang Sensus yaitu PP nomor 21 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Sensus Penduduk pada tanggal 2 Juli 1979. PP Nomor 2 Tahun 1983 tentang Sensus Pertanian pada tanggal 21 Januari 1983 dan PP Nomor 29 Tahun 1985 tentang Sensus Ekonomi pada tanggal 10 Juni 1985. Pada tanggal 29 Mei 1968, ditetapkan Peraturan Pemerintah No.16

Tahun 1968 yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja BPS (di pusat dan di daerah). Pada tanggal 20 Februari 1980, ditetapkan PP No. 6 Tahun 1980 tentang Organisasi BPS sebagai pengganti PPNo.16/1968. Berdasarkan PP Nomor 6/1980 di tiap propinsi terdapat perwakilan BPS dengan nama Kantor Statistik Propinsi, dan di tiap Kab/Kota terdapat perwakilan yang bernama Kantor Statistik Kab/Kota. Pada tanggal 9 Januari 1992, ditetapkan PP No.2 Tahun 1992 tentang Organisasi BPS sebagai pengganti PP No. 6 Tahun 1980. Kedudukan, fungsi, tugas, susunan organisas, dan Tata Kerja BPS yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1992. Pada tanggal 26 September 1997 dengan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Biro Pusat Statistik diubah namanya menjadi “Badan Pusat Statistik”, dan sekaligus menetapkan tanggal tersebut sebagai ” Hari Statistik”. Tahun 1998, ditetapkan Keppres No.86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik. Berdasarkan KepPres tersebut, perwakilan BPS di daerah adalah instansi vertikal dengan nama BPS Provinsi, BPS Kabupaten dan BPS Kotamadya. Pada tanggal 26 Mei 1999, ditetapkan PP Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Memasuki era Otonomi daerah, ditetapkan Keppres No.166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND) dan BPS masuk sebagai LPND.

Materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997, antara lain :

- Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga,

organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.

- Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.
- Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.
- Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.

2.2 Visi dan Misi Badan Pusat Statistik

Adapun visi dan misi Badan Pusat statistik adalah sebagai berikut :

Visi

Pelopor data statistik terpercaya untuk semua

Misi

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional.
2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistic.
3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

2.3 Arti Logo Badan Pusat Statistik

Logo pada Badan Pusat Statistik memiliki warna biru, hijau dan orange dan disetiap warna memiliki arti khusus, yaitu :

Biru

Melambangkan kegiatan sensus penduduk yang dilakukan sepuluh tahun sekali pada setiap tahun yang berakhiran angka 0 (nol).

Hijau

Melambangkan kegiatan sensus pertanian yang dilakukan sepuluh tahun sekali pada setiap tahun yang berakhiran angka 3 (tiga).

Orange

Melambangkan kegiatan sensus ekonomi yang dilakukan sepuluh tahun sekali pada setiap tahun yang berakhiran angka 6 (enam).



Gambar 1. Logo Badan Pusat Statistika

2.4 Tugas,Fungsi dan Kewenangan Badan Pusat Statistik

Tugas, fungsi dan kewenangan BPS telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

1. Tugas

Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan perundang- undangan.

2. Fungsi

- a. Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang statistik;
- b. Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;
- c. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
- d. Penetapan sistem statistik nasional;
- e. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang kegiatan statistik; dan
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

3. Kewenangan

- 1) Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- 2) Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- 3) Penetapan sistem informasi di bidangnya;
- 4) Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional;
- 5) Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik;
 - b. Penyusun pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.

2.5 Nilai-Nilai Inti Badan Pusat Statistik

Core values (nilai-nilai inti) BPS merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai Inti BPS terdiri dari:

1. PROFESIONAL

a. Kompeten

Mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban.

b. Efektif

Memberikan hasil maksimal.

c. Efisien

Mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal.

d. Inovatif

Selalu melakukan pembaruan dan/atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus menerus.

e. Sistemik

Meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses pekerjaan yang satu menjadi bagian tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain.

2. INTEGRITAS

a. Dedikasi

Memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi

b. Disiplin

Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

c. Konsisten

Satunya kata dengan perbuatan

d. Terbuka

Menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak.

e. Akuntabel

Bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur

f. AMANAH

a. Terpercaya

Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual

b. Jujur

Melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas

c. Tulus

Melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa

d. Adil

Menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya.

2.6 Sistem Statistik Nasional (SSN)

SSN adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur kebutuhan data statistik, sumber daya, metode, sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, perangkat hukum, dan memasukan dari Forum Masyarakat Statistik yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.

Tujuan mewujudkan dan mengembangkan SSN adalah :

- a. Agar para penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
- b. Menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh para penyelenggara kegiatan statistik.
- c. Terciptanya suatu SSN yang andal, efektif, dan efisien.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik yaitu :

1. Aspek kebutuhan data statistik.
2. Saran dan pertimbangan Forum Masyarakat Statistik.
3. Ketersediaan sumber daya manusia dan sumber dana, metode yang tepat, sarana dan prasarana yang memadai, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, aspek penyebarluasan data yang dihasilkan, serta kelengkapan perangkat umum.
4. Aspek koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi (KISS) yang dilakukan BPS dengan seluruh penyelenggara kegiatan statistik baik segenap instansi pemerintah dan atau unsur masyarakat dalam mengatur dan menetapkan :
 - Pembidangan jenis statistik.
 - Cara Pengumpulan data yang dilakukan
 - Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil statistik.
 - Pengelolaan rujukan statistik.

Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditunjukkan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki lintas sektoral berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS.

2.7 Diseminasi dan Pelayanan Informasi Statistik

Informasi statistik yang dikumpulkan oleh BPS disebarluaskan kepada masyarakat dengan berbagai cara, antara lain melalui :

1. Publikasi

Publikasi yang dihasilkan BPS dikirim secara cuma-cuma kepada instansi pemerintah atau tukar menukar dengan publikasi/data dari instansi tersebut. Publikasi juga dikirimkan ke perpustakaan nasional atau perpustakaan di tingkat provinsi badan-badan internasional serta kantor statistik dari negara lain. BPS pusat mempunyai perpustakaan yang

terbuka untuk umum, sehingga para pengunjung dapat membaca publikasi BPS maupun publikasi yang berasal dari instansi lain.

2. Bagian Humas dan Organisasi

Para pengguna data yang menghendaki informasi tentang BPS dan kegiatan statistik yang dilaksanakan dapat memperolehnya melalui bagian Humas dan Organisasi.

3. Layanan Statistik

Banyak dari para pengguna data BPS yang menginginkan informasi statistik yang lebih spesifik dan rinci. Untuk memenuhinya, BPS juga menyediakan sarana pemesanan melalui komputer.

4. Unit-unit Teknis yang terkait dan Kantor BPS Daerah

Para pengguna data yang menghendaki informasi statistik secara rinci dapat memperolehnya melalui unit-unit yang terkait, serta dari masing-masing BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota.

5. Melalui Jaringan Komputer

Para pencari data baik didalam negeri maupun luar negeri yang menghendaki akses langsung terhadap informasi statistik melalui jaringan komputer (Internet), dapat membuka home page BPS : <http://www.bps.go.id>. Berbagai data yang disajikan disini terbatas pada informasi umum dan tidak dipungut biaya.

2.8 Kegiatan Statistik BPS

Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, BPS berusaha dapat memenuhi kebutuhan data yang diperlukan oleh pemerintah dalam berbagai bidang baik ekonomi maupun sosial, yaitu : pertanian, pertambangan, industri, komunikasi, perdagangan, kependudukan, sosial, ketenagakerjaan, keuangan, pendapatan nasional, pendidikan dan agama. Menurut Undang-undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, tentang statistik, kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka

mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah :

1. Pengumpulan Data

Statistik diselenggarakan melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan cara:

a. Sensus

Sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi diseluruh Wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. Sensus dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 10 (Sepuluh) tahun oleh BPS yang meliputi :

1. Sensus penduduk yang dilaksanakan pada tahun yang berakhiran angka 0 (Nol).
2. Sensus pertanian dilaksanakan pada tahun berakhiran angka 3 (Tiga).
3. Sensus ekonomi yang dilaksanakan pada tahun berakhiran angka 6 (Enam).

b. Survei

Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel dari suatu populasi untuk memperkirakan karakteristik suatu objek pada saat tertentu. BPS juga melaksanakan survei antar sensus yaitu survei yang dilakukan diantara 2 (Dua) sensus sejenis. Survei antar sensus tersebut meliputi survei penduduk antar sensus (Supas), survei pertanian antar sensus (Sutas), dan survei ekonomi antar sensus (Setas). Berbagai ragam survei sektoral diantaranya adalah Survei Sosial Ekonomi Sosial (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Survei Biaya Hidup (SBH), Survei Potensi Desa (Podes), Survei Industri, Survei Pertanian, Survei Pendapatan Petani dan Struktur Ongkos Usaha Tani, Survei Koperasi Unit Desa (KUD), Survei Harga Konsumen, dan Survei Harga Produsen.

c. Kompilasi Produk Administrasi, dan

d. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Pengolahan Data

Tahap pengolahan data sangat menentukan seberapa jauh tingkat keakuratan dan ketetapan data statistik yang dihasilkan, BPS dianggap oleh instansi lainnya sebagai perintis dalam penggunaan komputer karena telah memulai penggunaannya sejak sekitar tahun 1960. Sebelum menggunakan komputer, BPS menggunakan kalkulator dan alat hitung sempoa dalam mengolah data. Teknologi komputer yang diterapkan di BPS selalu disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan juga mengacu kepada kebutuhan. Personal komputer yang secara umum lebih murah dan efisien telah dicoba digunakan untuk menggantikan computer mainframe. Sejak tahun 1980-an, personal komputer telah digunakan diseluruh kantor BPS provinsi, diikuti dengan penggunaan komputer diseluruh BPS Kabupaten dan Kota sejak tahun 1992. Dengan menggunakan personal komputer, kantor BPS di daerah dapat segera memproses pengolahan data, yang merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari pengumpulan data, kemudian dilanjutkan memasukkan data mentah kedalam komputer dan selanjutnya data tersebut dikirim ke BPS pusat untuk diolah menjadi data nasional. Pengolahan data menggunakan personal komputer telah lama menjadi contoh pengolahan yang diterapkan oleh direktorat teknis di BPS pusat, terutama jika direktorat tersebut harus mempublikasikan hasil yang diperoleh dari survei yang diselenggarakan.

Dalam pengolahan data, BPS juga telah mengembangkan berbagai program aplikasi untuk data entry, editing, validasi, tabulasi dan analisis dengan menggunakan berbagai macam bahasa dan paket komputer. BPS bertanggung jawab untuk mengembangkan berbagai perangkat lunak komputer serta mentransfer pengetahuan dan keahliannya kepada staf BPS daerah. Pembangunan infrastruktur teknologi informasi di BPS didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai yaitu mengikuti perkembangan permintaan dan kebutuhan dalam pengolahan data statistik, melakukan pembaharuan/inovasi dalam metode yang lebih baik serta memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi statistik.

3. Analisis Data

Dalam rangka mempermudah para pengguna data agar dapat membaca dan mengintegrasikan data yang dipublikasikan, BPS membuat analisis dan laporan statistik secara berkala. Hasil-hasil kegiatan statistik dianalisis dan disajikan dalam bentuk laporan/data rinci untuk bahan pengambilan keputusan. BPS juga membuat evaluasi kegiatan pembangunan dengan menyajikan indikator kinerja yang tipenya serta kinerjanya ditentukan oleh pemerintah pusat dan daerah melalui berbagai proses. Untuk mendapatkan manfaat optimal dari analisa data, BPS bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintah yang terkait dan lembaga-lembaga internasional serta bekerjasama dengan para pakar dan perguruan tinggi. Hal ini dilaksanakan segera setelah data dipublikasikan. Selain itu, BPS juga mengembangkan analisis dengan metode-metode statistik, antara lain analisis penentuan penduduk miskin, penggunaan tehnik-tehnik proyeksi dan ramalan, perhitungan neraca bahan makanan, dan standar konversi untuk berbagai seminar bagi masyarakat agar mereka dapat mengetahui hasil analisis BPS dan metode yang sedang berlaku dan metode yang akan datang.

2.9 Badan Pusat Statistik Kab.Toraja Utara

2.9.1 Visi dan Misi BPS Kab. Toraja Utara

Visi

Pelopor data statistik terpercaya untuk semua

Misi

1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien.
2. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia.

3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien.

2.9.2 Peran BPS

Berdasarkan undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut :

- Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder
- Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.
- Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik.
- Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

2.9.3 Program dan Kegiatan

1. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah maka Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara melakukan penetapan dan perjanjian kinerja tahunan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPS Kabupaten Toraja Utara (LAKIN)

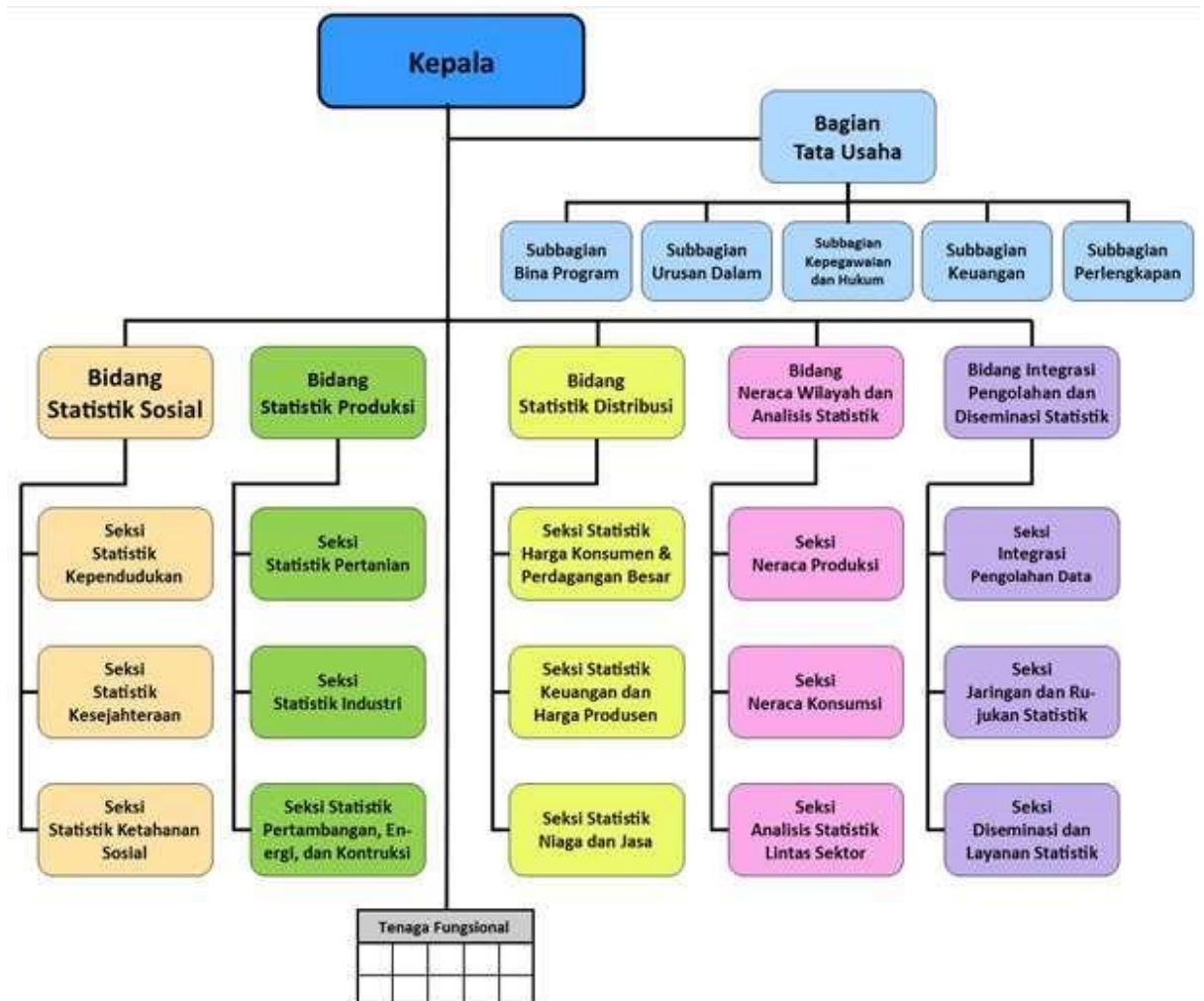
Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Toraja Utara merupakan wujud pertanggung jawaban dan akuntabilitas kinerja BPS sebagai penyelenggara negara. Maksud penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Tujuan laporan ini adalah mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS Kabupaten Toraja Utara selama tahun terkait. Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun, perkembangan capaian kinerja terhadap periode Renstra sebelumnya, serta capaian kinerja terhadap target Renstra. Hasil dari laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun mendatang.

2. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara (Renstra BPS Kabupaten Toraja Utara) adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Kabupaten Toraja Utara untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kontribusi BPS dalam pencapaian sasaran, agenda, dan misi pembangunan serta program lanjutan dalam quickwins presiden. Semua unit kerja, satuan kerja, pimpinan, dan staf BPS harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi BPS sebagai Pelopor Data

Statistik Terpercaya Untuk Semua, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan dalam Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah Visi, Misi, dan Tujuan Renstra BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun.

2.9.4 Struktur Organisasi



Gambar 2. Struktur Organisasi BPS Kab.Toraja

III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Berikut ini merupakan rangkuman pekerjaan yang dilakukan penulis Selama melaksanakan kegiatan PKL di BPS Kab. Toraja Utara :

1. Apel pagi (Kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari senin)
2. Pengisian daftar hadir
3. Membantu persiapan sosialisasi Sensus Penduduk Online (SPO)
4. Mengikuti kegiatan sosialisasi SPO di SMK 3 Toraja Utara
5. Membantu mengentry/menginput data-data kedalam sebuah portal BPS
6. Mengikuti rapat persiapan SAKERNAS dengan para pegawai-pegawai BPS
7. Membantu fotocopy surat edaran sosialisasi Sensus Penduduk Online
8. Mengikuti kegiatan pelatihan sakernas di Toraja Heritage Hotel
9. Mengikuti Kegiatan sosialisasi SPO di SMA Katolik Rantepao
10. Membantu mengeprint peta setiap kecamatan yang ada di Toraja Utara
11. Membantu scan data-data yang diperlukan untuk kegiatan SPO

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah

Tabel 1 merupakan data realisasi pendapatan pemerintah daerah di Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2015-2018. Data di ambil dari website resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara.

Tabel 1. Data Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Toraja Utara Dari Tahun 2015-2018

Jenis Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah (Ribu Rupiah)			
	2015	2016	2017	2018
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	33808407	34896515	58562507	41976384
1.1 Pajak Daerah	10300490	10849357	20734818	18403535
1.2 Retribusi Daerah	6663345	7446871	19773300	14106453
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2689533	3758828	5224770	4272403
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	14155039	12841459	12829619	5193993
2. Dana Perimbangan	621128846	677025597	761145412	803905248
2.1 Bagi Hasil Pajak	9949696	10421393	11836691	13803155
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1871879	6069527	4826166	8000529
2.3 Dana Alokasi Umum	471481781	527790139	519040535	519040535
2.4 Dana Alokasi Khusus	107826600	132744538	117108991	263061029
2.5 Dana Desa	29998890	0	108333029	0
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	137144700	161335271	169159368	220894813
3.1 Pendapatan Hibah	6604407	0	35464784	0
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	27722685	30574318	31964784	34295767
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	0	67191556	0	109601625
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	12746215	13319326	12767640	10115284
3.6 Lainnya	90071393	50250071	88962160	66882137
TOTAL	792081953	873257383	1234394900	1066776445

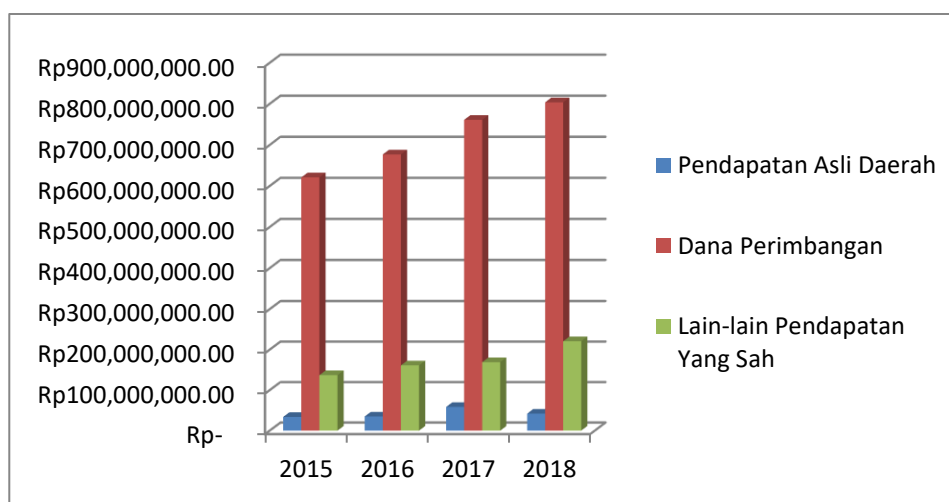
4.2 Data Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah

Tabel 2 merupakan data realisasi pengeluaran pemerintah daerah di Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2015-2018. Data di ambil dari website resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara.

Tabel 2. Data Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Toraja Utara Dari Tahun 2015-2018

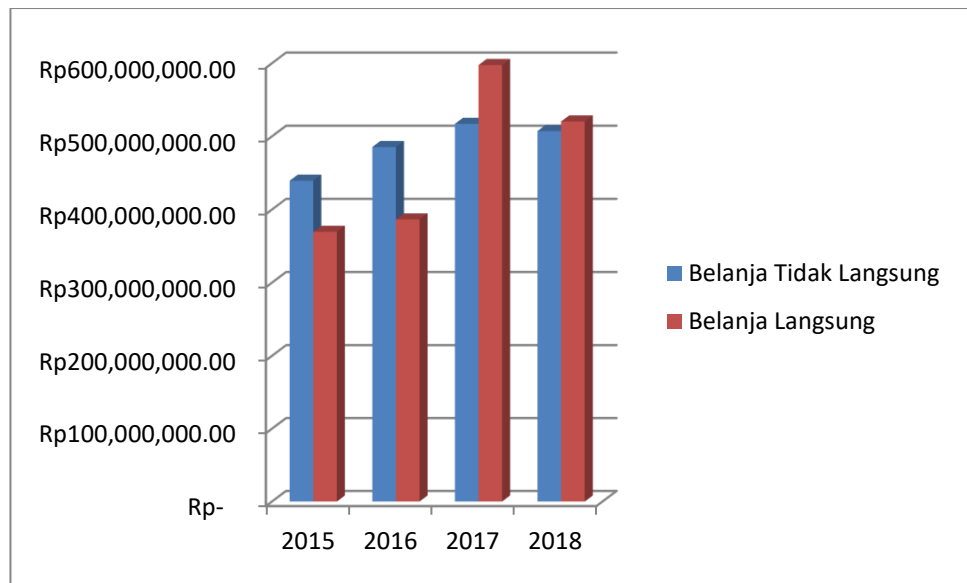
Jenis Belanja Daerah	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah (Ribu Rupiah)			
	2015	2016	2017	2018
1. Belanja Tidak Langsung	439386129	495495828	517096669	507402929
1.1 Belanja Pegawai	334710609	360964556	335496849	329402002
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	23406146	9409683	11383550	9804240
1.5 Belanja Bantuan Sosial	506723	0	0	0
1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	2038637	0	5076512	4401490
1.7 Belanja bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kotada Pro	78724014	122744251	163139758	163643837
1.8 Belanja Tidak Terduga	0	2377338	2000000	151360
2. Belanja Langsung	369539508	386467306	597502670	520345735
2.1 Belanja Pegawai	17757137	17771931	16617779	15729955
2.2 Belanja Barang dan Jasa	173102039	161242572	308031085	288372451
2.3 Belanja Modal	178680332	207452803	272853806	216243329
TOTAL	808925637	881963134	1114599335	1027597304

4.3 Grafik Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah



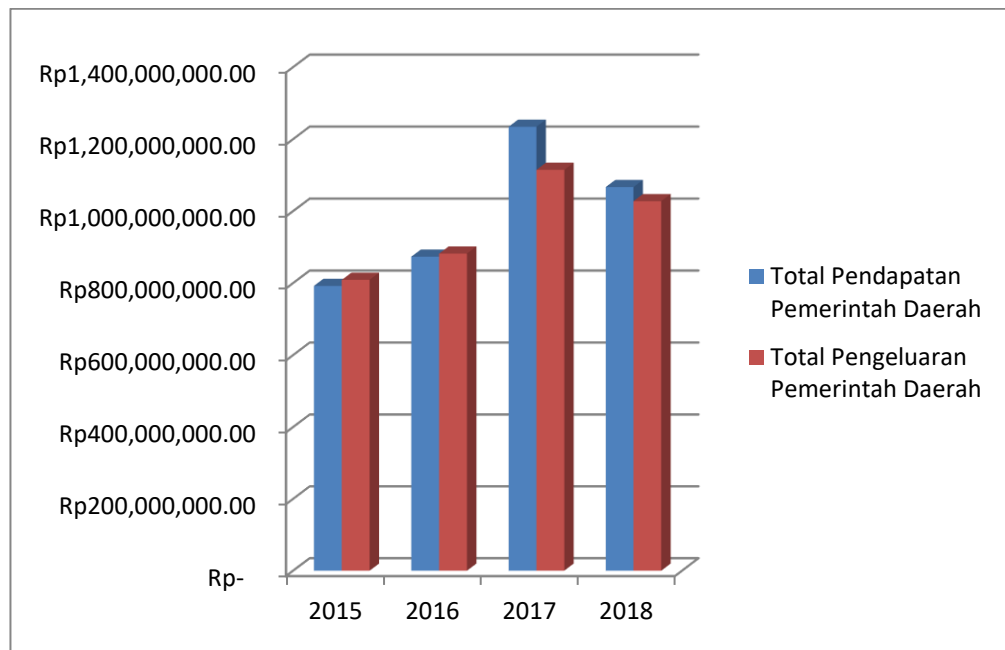
Gambar 3. Grafik Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah

4.3 Grafik Realisasi Pegeluaran Pemerintah Daerah



Gambar 4. Grafik Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah

4.4 Grafik Perbandingan Realisasi Pendapatan pemerintah Daerah dengan Realisasi Pngeluaran Pemerintah Daerah



Gambar 5. Grafik Perbandingan Realisasi Pendapatan dengan pengeluaran Pemerintah Daerah

4.5 Pembahasan

Praktek Kerja Lapangan merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Badan Pusat Statistika Kabupaten Toraja Utara. Penulis banyak memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam dunia pekerjaan terlebih khusus tentang bagaimana cara BPS mengumpulkan data yang begitu banyak sampai dengan proses data tersebut diolah sehingga menjadi suatu data statistik dengan tingkat keakuratan yang tinggi . Salah satu data yang diambil penulis untuk dibahas dalam laporan ini yaitu data realisasi pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah di kabupaten toraja utara pada tahun 2015-2018. Data tersebut akan di analisa perbandingannya dan juga akan di analisa apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perbandingan tersebut.

Sesuai dengan data yang sudah terlampir pada tabel 2 dapat dilihat bahwa besarnya penerimaan/pendapatan daerah diperoleh dari :

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang sebagian besar didukung oleh penerimaan dari pajak dan retribusi.
- b) Dana Perimbangan, yang terbagi atas bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).
- c) Lain-Lain Pendapatan Daerah, yang dihimpun dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya.

Dari grafik 3 dapat dianalisa bahwa pada tahun 2015 dan 2016 total pendapatan pemerintah daerah lebih kecil dibandingkan dengan total pengeluaran pemerintah daerah. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 total pendapatan pemerintah daerah lebih besar dibandingkan dengan total pengeluaran pemerintah daerah. Total realisasi pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2018 adalah sebesar 1.066,77 milyar rupiah, menurun sebesar 13,57 persen dari tahun sebelumnya sebesar 1.234,39 milyar rupiah. Penurunan tersebut

dipegaruhi oleh penerimaan dari komponen Pendapatan Asli Daerah yang berkurang sebanyak 16,57 milyar rupiah atau 28,32 persen dari tahun sebelumnya.

Sub komponen Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai komponen pendapatan yang memberi kontribusi terbesar, yaitu sebesar 48,66 persen dari total Pendapatan Daerah, diisusul komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 24,66 persen. Sementara kontribusi yang relatif kecil bersumber dari komponen Bagian Laba dari BUMD sebesar 0,40 persen.

Pada tahun anggaran 2018, total belanja pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara adalah sebanyak 1.027,59 milyar rupiah. Jumlah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan komponen belanja tidak langsung 507,25 miliar rupiah (49,36%) dan belanja langsung sebesar 520,34 miliar rupiah (50,64%) dari total belanja pemerintah daerah pada tahun anggaran tersebut. Jumlah pengeluaran pada komponen belanja tidak langsung didominasi oleh kebutuhan dana untuk membayar upah/gaji pegawai, yaitu sebesar 329,40 miliar atau 32,06 persen dari jumlah total pengeluaran pemerintah Kabupaten Toraja Utara pada tahun anggaran tersebut. Sedangkan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta belanja tidak terduga lainnya.

Belanja langsung pemerintah Toraja Utara dibagi dalam tiga komponen, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Bagian belanja langsung yang paling besar adalah belanja barang dan jasa yaitu 308,03 miliar dan modal sebesar 272,85 miliar rupiah. Sisanya adalah belanja pegawai sebesar 16,62 miliar rupiah.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari laporan ini, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2015 dan 2016 total pendapatan pemerintah daerah Kab. Toraja Utara lebih kecil dibandingkan dengan total pengeluarannya. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 total pendapatan pemerintah daerah lebih besar dibandingkan dengan total pengeluarannya. Total realisasi pendapatan pemerintah daerah pada tahun 2018 adalah sebesar 1.066,77 milyar rupiah, menurun sebesar 13,57 persen dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1.234,39 milyar rupiah.
2. Pada tahun 2017 total pendapatan pemerintah daerah sangat tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun yang lainnya. Hal tersebut dipengaruhi karena tingginya pendapatan asli daerah di tahun tersebut. Walaupun ditahun 2017 total dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2018, jika dibandingkan maka total pendapatan pemerintah daerah ditahun 2017 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2018. Penurunan total realisasi pendapatan pemerintah daerah di tahun 2018 dipengaruhi oleh penerimaan dari komponen pendapatan asli daerah yang berkurang sebanyak 16,57 milyar rupiah atau 28,32% dari tahun sebelumnya.

5.2 Saran

Tetap mempertahankan lingkungan kerja dengan suasana kekeluargaan sehingga setiap pegawai maupun mahasiswa yang sedang melakukan program praktik kerja merasa nyaman dan senang berada di lingkungan BPS Kabupaten Toraja Utara.

DAFTAR PUSTAKA

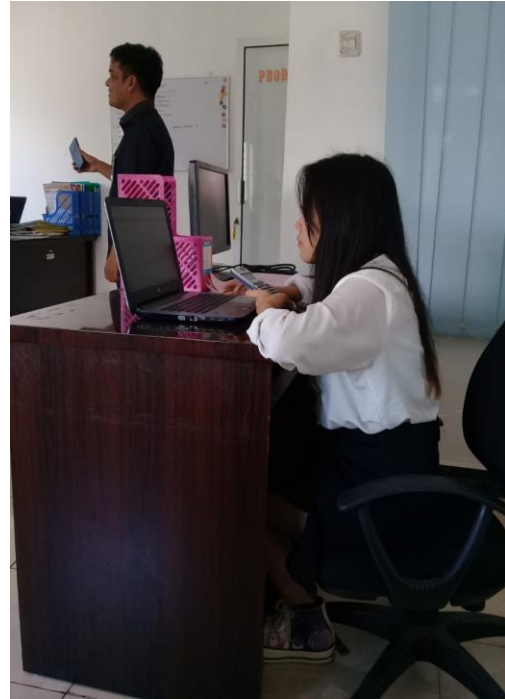
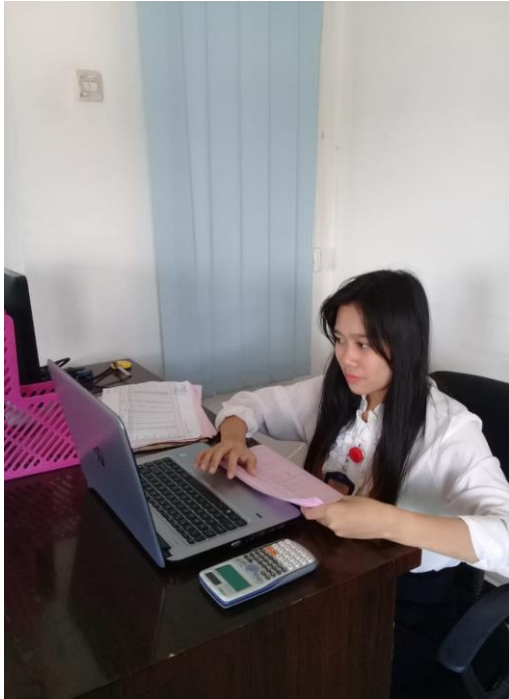
Badan Pusat Statistik (BPS). “Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah) tahun 2015–2018 diakses dari <http://www.torutkab.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 18 Februari 2020 pada jam 19.27 WITA.

Badan Pusat Statistik (BPS). “Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Menurut Jenis Belanja (ribu rupiah) tahun 2015-2018 diakses dari <http://www.torutkab.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2020 pada jam 10.28 WITA.

Badan Pusat Statistik (BPS) diakses dari <http://www.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 21 Februari 2020 pada jam 15.48 WITA.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Proses Penginputan Data



Lampiran 2. Kegiatan Pelatihan SAKERNAS di Toraja Heritage Hotel



Lampiran 3. Sosialisasi Sensus Penduduk Online di SMA Katolik Rantepao

